



newsletter

Tanhana Dharma Mangrva • edisi 119, Juni 2019



Penandatanganan Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan ANRI dan LPP RRI (hal. 11)

Agus Widjojo: Gagal Paham Berdemokrasi Bisa Hambat Kemajuan.....	2
Menhan Berikan Ceramah Ke PPRA 59.....	3
Lemhannas RI Peringati Nuzulul Quran 1440 H.....	4
Gubernur Lemhannas RI Berikan Ceramah Kebijakan Publik.....	5
National Defence College India Kunjungi Lemhannas RI....	6

Hadiri Shangri-La Dialogue 2019, Gubernur Lemhannas RI Bahas Industri Pertahanan.....	7
Gubernur Lemhannas RI Berikan Ceramah tentang Kepemimpinan di PPSA 22	8
Lemhannas RI Selenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila.....	9
Airlangga Hartarto: Manufaktur Indonesia Sudah Meningkat...	10
Penandatanganan Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan ANRI dan LPP RRI.....	11

Agus Widjojo: Gagal Paham Berdemokrasi Bisa Hambat Kemajuan

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi pembicara utama pada Forum Diskusi: Positive People With Positive Power pada Selasa (21/5), di Balai Sudirman, Jakarta.

Dalam forum diskusi yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB HMI) Periode 2018-2020, Agus menyebutkan, gagal paham tentang demokrasi tersebut perlu diwaspadai. Menurutnya, kebebasan dalam berdemokrasi, tanpa ada batasan tanggung jawab menjadi salah satu sebab tantangan dalam memajukan bangsa Indonesia.

“Gagal paham dalam demokrasi, ketika melihat demokrasi hanya tentang kebebasan, padahal dalam kebebasan ada tanggung jawab yang diemban, ini dapat menghambat kemajuan bangsa”, ungkap Agus

Agus menambahkan, hal lain yang dapat menghambat kemajuan bangsa ini adalah gagal paham mengenai konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan. “Gagal paham terhadap konsep dasar ilmu pengetahuan disebabkan karena lemahnya pendidikan. Tantangan bangsa ini adalah bagaimana membentuk manusia yang berpikir komprehensif, mampu berpikir kreatif dan berani berkompetisi

sebagai warga negara yang baik yang mengerti mengenai hak dan kewajibannya”, jelas Agus.

Agus kemudian menyoroti peluang bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Keadaan demografi Indonesia memiliki jumlah usia produktif yang lebih besar dibandingkan dengan usia non produktif sehingga perlu dikelola dengan baik kualitas SDM-nya. “Penduduk usia produktif harus dibekali dengan pendidikan yang mumpuni agar terampil dan berpengetahuan, jangan sampai bonus demografi tersebut malah merugikan”, pungkasnya.

“Gagal paham dalam demokrasi, ketika melihat demokrasi hanya tentang kebebasan, padahal dalam kebebasan ada tanggung jawab yang diemban, ini dapat menghambat kemajuan bangsa”.

*Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo*





Menhan Berikan Ceramah Ke PPRA 59

Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu memberikan ceramah kepada peserta PPRA 59 pada Selasa, (21/05) di ruang NKRI, Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI dengan topik “Kebijakan Strategi Pertahanan dan Keamanan Negara dalam Menghadapi Berbagai Tantangan Indonesia Saat Ini dan ke Depan yang Semakin Dinamis dan Kompleks”.

Dalam ceramahnya tersebut, Ryamizard mengajak para peserta dapat membangkitkan pemikiran dan komitmen bersama dalam mewujudkan pertahanan negara yang tangguh melalui sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang memadukan komponen pertahanan yang berlandaskan jiwa dan harkat bangsa Indonesia yang didukung oleh kekuatan TNI serta alat utama sistem persenjataannya (alutsista).

Terkait dengan kebijakan alutsista, Menhan menyatakan tengah berfokus untuk membangun industri pertahanan agar tercipta kemandirian yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Penentuan kebutuhan alutsista pertahanan negara harus disesuaikan dengan strategi pertahanan negara saat ini. Artinya, harus ada kesesuaian antara hakekat dan potensi ancaman yang kita hadapi dengan kebutuhan alutsista yang akan diberi atau dipenuhi”, ungkap Ryamizard.

“ Penentuan kebutuhan alutsista pertahanan negara harus disesuaikan dengan strategi pertahanan negara saat ini.

*Menteri Pertahanan Republik Indonesia
Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu*

Dalam merumuskan strategi pertahanan harus mengacu pada perkembangan kondisi aktual potensi ancaman negara masa kini dan masa yang akan datang. Dari persepsi ancaman tersebut, Kemenhan akan merumuskan dan menetapkan kebijakan pertahanan negara yang pelaksanaannya akan melibatkan semua komponen bangsa.

“Saat ini setidaknya ada tiga bentuk ancaman, pertama ancaman bentuk nyata dari terorisme dan radikalisme, separatis dan pemberontakan, bencana alam dan lingkungan, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, perang siber & intelijen, dan narkoba. Kedua adalah ancaman bentuk belum nyata, yaitu konflik terbuka atau perang konvensional. Dan yang terakhir adalah ancaman mindset yang ingin mengubah ideologi Pancasila melalui brain washing”, jelas Ryamizard.

Jakarta, 22 Mei 2019



Lemhannas RI Peringati Nuzulul Quran 1440 H

Lemhannas RI mengadakan peringatan Nuzulul Quran 1440 H, pada Rabu (22/05), di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI. Peringatan Nuzulul Quran kali ini mengangkat tema “Dengan Hikmah Nuzulul Quran Kita Tingkatkan Sikap Toleransi Guna Memperkokoh NKRI”, yang disampaikan oleh K.H. Ahmad Muwafiq yang juga dikenal sebagai Gus Muwafiq, dan dihadiri oleh seluruh jajaran Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo ketika membuka kegiatan ini menyampaikan bahwa, dalam membangun kehidupan bermasyarakat kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi kemajemukan, suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan prinsip-prinsip universal yang diajarkan oleh Al-Quran. “Jika ada perbedaan-perbedaan sikap dan pendapat, maka perbedaan itu harus kita terima dan kelola dengan baik. Kita harus dapat menunjukkan citra Islam yang ramah dan toleran serta menjauhi segala bentuk fitnah yang dapat merugikan harkat dan martabat manusia” kata Agus.

Sementara itu, Gus Muwafiq dalam ceramahnya menjelaskan hidup manusia tidak bisa berdiri sendiri, maka manusia harus punya landasan kedudukan bahwa manusia di dunia mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapat rahmat Allah. “Ini landasan dasar bagaimana orang memahami bahwa Allah berada pada titik Ar-Rahman yang punya belas kasihan didunia dan akhirat. Kalau ini

tidak terjadi, tidak bisa dipahami, maka apa yang disebut toleransi itu engga nyambung, makannya Islam ini indah, perangkatnya luar biasa”, jelas Gus Muwafiq.

Gus Muwafiq menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. “Kita ini bagian dari bangsa Indonesia, dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan perbedaan, bangsa paling banyak, dan suku paling banyak itu ada di Indonesia. Jadi kalau ada prestasi besar bangsa ini, itu (negara lain) dunia tidak akan bisa mengulang prestasi besar Indonesia. Kita ini puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu Negara yaitu, Indonesia”, ungkapnya.

Gus Muwafiq juga menjelaskan bahwa Nuzulul bertujuan untuk mengubah peradaban besar. Namun, masalah yang muncul saat ini adalah adanya banyak penghafal Al-Quran tapi peradabannya mundur. “Engga mungkin salah Al-Qurannya tapi salah manusianya dan ini menjadi refleksi kita bareng-bareng”, jelasnya.

“*Hidup manusia tidak bisa berdiri sendiri, maka manusia harus punya landasan kedudukan bahwa manusia di dunia mempunyai kedudukan yang sama untuk mendapat rahmat Allah.*

Gus Muwafiq

Gubernur Lemhannas RI Berikan Ceramah Kebijakan Publik

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan ceramah di hadapan para peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) 22 tentang “Kebijakan Publik di Era Demokrasi” pada Jumat (24/5), di Ruang Bhineka Tunggal Ika, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI.

Menurut Agus Widjojo, kebijakan publik penting dikuasai oleh para politisi yang telah menjadi pejabat publik. “Ini merupakan mandat yang diberikan oleh rakyat kepada pejabat publik yang dipilih melalui pemilu. Di dalamnya ada harapan rakyat” sambung Agus.

Agus menjelaskan beberapa elemen yang berpengaruh dalam pembuatan kebijakan publik, yang pertama elemen eksternal yaitu iklim, struktur sosial, kebudayaan politik, Hubungan Internasional, ilmu dan teknologi, kekayaan alam, dan perekonomian. Sedangkan elemen internal diperhitungkan dalam proses pembuatan kebijakan yang diwakili oleh pejabat-pejabat dari ormas, partai politik, asosiasi bisnis, LSM, dll.

Di Indonesia, kebijakan publik juga berhubungan dengan Pancasila dan konsensus dasar kebangsaan karena falsafah dasar kebangsaan kita adalah Pancasila. Dari ideologi filsafah bangsa tersebut turunlah kebijakan nasional, yang diikuti dengan turunnya kebijakan pembangunan, dan terakhir turunlah kebijakan publik.

Agus menyampaikan bahwa dalam demokrasi itu perlu konsultasi publik dan perlu lebih untuk menjangkau aspirasi, walaupun nantinya untuk memutuskan hal-hal tersebut ada pada kewenangan pemerintah.

Agus juga berpendapat bahwa dalam setiap proses itu tidak pernah satu arah, akan selalu terdapat proses dua arah yaitu top down dan bottom up. “Proses dari bawah biasa disebut proses aspiratif dan dari atas ke bawah biasanya mengandung proses edukatif, jadi harus selalu ada proses edukatif yang mengimbangi proses aspiratif. Proses aspiratif itu bukan segala-galanya, walaupun sekalipun itu dalam demokrasi, pemerintah tetap harus mempunyai kewenangan untuk bisa menyelenggarakan fungsi yang sifatnya mengarahkan pembangunan supaya terintegrasi”, jelas Agus.

“Kebijakan publik penting dikuasai oleh para politisi yang telah menjadi pejabat

*Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo*





National Defence College India Kunjungi Lemhannas RI

Delegasi National Defence College (NDC) India melakukan kunjungan ke Lembaga Ketahanan Nasional RI, Senin (27/5). Kunjungan dipimpin oleh Mayor Jenderal Harkirat Singh didampingi oleh 14 delegasi lainnya. Delegasi diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang didampingi oleh Wakil Gubernur Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan, Kepala Biro Kerja Sama Laksma TNI Budi Setiawan, S.T serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat Brigjen TNI Sugeng Santoso, S.I.P.

Diawali dengan courtesy call, Agus menyampaikan terima kasih atas kunjungan NDC India ke Lemhannas RI. Dalam kesempatan tersebut Mayjen Harkirat Singh menanyakan mengenai Pemilihan Umum yang telah berlangsung dengan sukses. Agus menjelaskan bahwa keadaan demokrasi Indonesia yang dapat menghasilkan pemilu yang sukses bukanlah perjalanan yang mudah.

Setidaknya ada dua tantangan dalam demokrasi Indonesia, yang pertama adalah untuk menyamakan persepsi dari demokrasi yang sesungguhnya karena Indonesia masih mendambakan kepemimpinan

Keadaan demokrasi Indonesia yang dapat menghasilkan pemilu yang sukses bukanlah perjalanan yang mudah.

*Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo*

yang kuat dan efektif, yang kedua adalah menjadikan masyarakat nyaman dan mengenal karakter berdemokrasi karena pada dasarnya demokrasi adalah proses yang akan berjalan terus menerus.

Usai courtesy call, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi mengenai sistem pemerintahan Indonesia dan lingkungan strategis regional dengan pemateri Tenaga Profesional Bidang SKA (Sumber Kekayaan Alam) dan Tannas Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, D.E.A. Dalam Diskusi ini dihadiri perwakilan peserta PPRA 22 dan PPSA 59 Lemhannas RI. Lawatan rombongan NDC ke Lemhannas RI ditutup dengan mendatangi Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) Lemhannas RI untuk melihat bagaimana sistem pengukuran ketahanan nasional.

Hadiri Shangri-La Dialogue 2019, Gubernur Lemhannas RI Bahas Industri Pertahanan

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bertolak ke Singapura untuk hadir sebagai salah satu pembicara pada Sabtu (1/6) di forum Shangri-La Dialogue. Pada forum tahunan bergengsi yang dihadiri oleh pengambil kebijakan dan pelaku sektor pertahanan keamanan di Asia Pasifik ini, Agus Widjojo memaparkan tentang keseimbangan antara kemandirian dalam negeri dan kolaborasi dengan negara lain dalam industri pertahanan.

Menurut Agus, kemandirian industri pertahanan harus dipahami dalam konteks kemandirian pada sektor pertahanan itu sendiri. "Kemandirian pertahanan hanya dapat dilakukan jika negara mampu mengatasi semua ancaman dengan baik dan tepat waktu, yang dibekali dengan kesiapan personel, pelatihan, dan peralatan. Semua komponen kemandirian pertahanan ini tidak bersifat parsial karena untuk memenuhinya diperlukan kolaborasi", jelas Agus.

Dengan kata lain, pemahaman tentang kemandirian pertahanan harus bertujuan untuk mempersenjatai pasukan dengan segala tingkatan alutsista yang sesuai dengan ancaman. "Alutsista ini bisa berasal dari sumber dalam negeri atau dari luar", ungkap Agus.

Agus melanjutkan, dengan menyeimbangkan antara kemandirian dengan kolaborasi akan tercapai efisiensi dalam

pembangunan teknologi industri pertahanan. Dengan kolaborasi terdapat tukar manfaat teknologi, penelitian, dan pengembangan. "Elemen pertimbangan lainnya terkait dengan kecepatan perubahan pada teknologi pertahanan, yang membuat satu negara hanya mengandalkan pada tingkat penelitian dan teknologinya sendiri. Dan yang terakhir, kebutuhan interoperabilitas untuk menjalankan operasi keamanan gabungan yang sejalan dengan posisi politik suatu negara akan mustahil terwujud tanpa adanya kolaborasi dalam pembangunan industri pertahanan" kata Agus.

Di akhir paparannya, Agus Widjojo menekankan bahwa kemandirian yang komprehensif justru akan tercapai jika didahului dengan kolaborasi. Seperti halnya Indonesia dengan kemandirian dan kolaborasinya dalam industri pertahanan, berkontribusi dalam pembentukan perdamaian dan keamanan kawasan untuk mengelola potensi-potensi konflik dengan negara-negara besar yang berkepentingan di kawasan.

Pada forum ini, selain Agus Widjojo hadir pula beberapa tokoh lainnya sebagai pembicara mewakili Indonesia antara lain Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Plt. Deputi Bidang Proteksi Badan Siber dan Sandi Negara Agung Nugraha.



KEPEMIMPINAN NASIONA

DISAMPAIKAN OLEH:

LETJEN TNI (PURN.) AGUS WIDJOJO
GUBERNUR LEMHANNAS RI

JAKARTA, 10 JUNI 2019

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

“

Pemimpin tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat

*Gubernur Lemhannas RI
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo*

Gubernur Lemhannas RI Berikan Ceramah tentang Kepemimpinan di PPSA 22

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan ceramah kepada peserta PPSA 22, tentang kepemimpinan nasional dengan topik “Resume Implementasi Kepemimpinan Nasional” pada Senin (10/6), di Ruang Bhinneka Gedung Pancagatra Lantai 3, Lemhannas RI.

Menurut Agus Widjojo, kapasitas kepemimpinan tidak bisa dibentuk secara instan, melainkan sebuah proses panjang yang melibatkan proses kehidupan itu sendiri. “Pemimpin tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat” ujarnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan bahwa kepemimpinan dibentuk berdasarkan akumulasi pengalaman seumur hidup tergantung dari pemimpin dalam mengambil kekayaan dari pengalaman sepanjang hidup. Kekayaan tersebut akan membentuk kematangan kepemimpinan. Kekayaan yang harus dimiliki oleh pemimpin salah satunya adalah pengetahuan yang akan menjadi bekal agar kepemimpinan jadi lebih paripurna. Tidak ada pemimpin yang melaksanakan fungsi kepemimpinannya tanpa adanya landasan pengetahuan, bahkan terkadang perbedaan kualitas setiap pemimpin

ditentukan oleh perbedaan fondasi pengetahuan.

Selain itu, Agus juga menjelaskan nilai dan kualitas yang dimiliki pemimpin. Nilai, yang menjadi nilai kepribadian pemimpin, dapat menjadi salah satu yang menentukan bagaimana kekuasaan dipraktekkan atau dibatasi. Kepemimpinan yang digerakkan oleh nilai akan menjadikan nilai tersebut sebagai kekuatan pendorong terhadap suatu kepemimpinan yang berhasil.

“Nilai dibentuk oleh pengalaman hidup seseorang yang menjadi keyakinan, juga memiliki pengaruh untuk menentukan tujuan seseorang”, jelas Agus. Sedangkan kualitas yang diperlukan seorang pemimpin adalah kharismatis, stimulasi intelektual, pertimbangan dalam kemasam perseorangan, serta kepemimpinan transformasional.

Menutup ceramahnya, Agus menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan tidak terpisahkan dari dan merupakan refleksi karakter dan kepribadian pemimpin, dengan mengintegrasikan ciri terbaik untuk menentukan gaya kepemimpinan yang paling tepat dengan situasi yang ada.

Lemhannas RI Selenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila

Lemhannas RI menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila pada Selasa (11/6), di Lapangan Tengah Lemhannas RI. Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila ini diikuti oleh seluruh anggota Lemhannas RI beserta peserta PPSA 22 dan PPRA 59.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan sambutan Plt.Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Hariyono. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa Hari Lahir Pancasila diperingati untuk menghormati jasa pendiri bangsa sekaligus meneguhkan komitmen terhadap ideologi negara.

Dalam memperingati Hari Lahir Pancasila, masyarakat dapat berusaha mengenang dan merefleksikan momentum sejarah dimana pendiri bangsa berhasil menggali nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia sebagai dasar negara sehingga bangsa nusantara yang beragam dapat bersatu dan menyatu sebagai satu bangsa.

Selain itu, dengan memperingati Hari Lahir Pancasila ini, diharapkan dapat membangun kebersamaan dan harapan untuk

menyongsong kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dijadikan sebagai sumber inspirasi “politik harapan” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Budaya politik yang dapat menumbuhkan dan merawat harapan, bukan politik yang menimbulkan ketakutan” sambung Hariyono dalam sambutannya yang dibacakan oleh Agus.

Peringatan Hari Lahir Pancasila diselenggarakan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila.

“Budaya politik yang dapat menumbuhkan dan merawat harapan, bukan politik yang menimbulkan ketakutan”

Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, Hariyono





Airlangga Hartarto: Manufaktur Indonesia Sudah Meningkatkan

Dan jika dilihat dari *Global Manufacturing Value Added*, Indonesia dari segi manufakturnya sudah meningkat di posisi 9th ujar Menteri Perindustrian, Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., saat memberikan ceramah kepada peserta PPRA 59 di ruang NKRI, Gedung Panca Gatra, lantai 3 Lemhannas RI pada Rabu (12/6).

Dalam ceramahnya yang berjudul “Memperkuat Kemandirian Industri Nasional dengan Making Indonesia 4.0”, Airlangga menjelaskan bahwa *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia rata-rata diatas 50%, dan pada bulan Juni ini, menempati posisi paling tinggi dari bulan-bulan sebelumnya yaitu 51,6%. Airlangga juga menjelaskan bahwa bila PMI diatas 50% itu berarti *production* dan *confidence* dari para industri sangat tinggi.

Dan bila dilihat dari berbagai sektor, persentasi terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) dari sektor manufaktur adalah yang tertinggi, yaitu 20,07%. Sedangkan untuk perdagangan menempati posisi kedua, untuk persentasi GDP nya sebanyak 13,20%, dan posisi ketiga ditempati oleh Pertanian dengan 12,65%. Sedangkan untuk sektor ICT (*information, communication & technology*) pertumbuhannya tinggi, yaitu 9,03%, tetapi persentasi GDP nya relatif kecil, hanya 3,92%. Airlangga juga menyatakan jika Indonesia ingin pertumbuhannya tinggi

“*Jika Indonesia ingin pertumbuhannya tinggi maka yang harus didorong adalah sektor manufaktur.*

*Menteri Perindustrian,
Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T*

maka yang harus didorong adalah sektor manufaktur.

Sedangkan sektor penerimaan negara, bila dilihat dari penerimaan pajak, Rp 363,60 triliunnya berasal dari sektor industri, dengan persentase 30%. Maka sektor industri adalah yang tertinggi dalam penerimaan pajak, dengan pertumbuhan sebanyak 11,12%. Sedangkan dari penerimaan cukai sendiri, sektor industri berkontribusi sebanyak 151,71 triliun dari total realisasi cukai yang berjumlah Rp 159,69 triliun, artinya sektor industri berkontribusi sebanyak 95%.

Dari studi yang dilakukan Kementerian Perindustrian, McKinsey, *Price Waterhouse Coopers* (PwC) dan yang lain, terjadi semacam konsensus bahwa tahun 2030 ekonomi Indonesia menjadi 10 besar, atau lebih progresif lagi dikatakan ekonomi nomer 7 di dunia. Kontribusinya dari ekspor ditingkatkan 10%, peningkatan produktivitas terhadap biaya dinaikkan 2 kali, pembangunan perokonomian berbasis inovasi 2% pengeluaran R&D terhadap PDB.

Penandatanganan Nota Kesepahaman Lemhannas RI dengan ANRI dan LPP RRI

Lemhannas RI menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Arsip Nasional RI (ANRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) pada Jumat (14/6), di Gedung Trigatra, Lantai I, Lemhannas RI.

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya berharap bahwa nota kesepahaman antara Lemhannas RI dengan ANRI dan LPP RRI tidak hanya menjadi acara seremonial, namun diimplementasikan dalam kegiatan nyata secara konsisten terkait bidang-bidang yang ada dalam ruang lingkup kerja sama. Selain itu, Sinergi ketiga institusi ini juga diharapkan dapat menjadi upaya bersama dalam memperkuat wawasan kebangsaan sebagai prasyarat mutlak dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI Mohammad Rohanudin menyampaikan bahwa kerja sama dengan Lemhannas RI merupakan hal yang sangat penting sebagai sebuah upaya untuk bersama-sama menyuarakan kesatuan Indonesia, internalisasi Nilai-Nilai Pancasila, membangun kohesi bangsa dan toleransi melalui siaran-siaran budaya.

Sedangkan, Kepala ANRI Dr. Mustari Irawan, MPA menyatakan kesamaan pandangan antara ANRI dan Lemhannas RI adalah keyakinan akan kondisi dan keadaan masa depan yang lebih baik. Mustari mengatakan bahwa upaya kerja sama dilakukan terus menerus dan selalu diperbarui untuk membangun sebuah kesadaran bahwa masa lalu merupakan bagian penting untuk melihat masa depan. Dalam membangun masa depan, Mustari mengatakan, pengembangan

SDM khususnya pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang penting karena seorang pemimpin harus menjadi panutan serta harus mencintai negerinya.

Selain hal tersebut, Mustari juga mengungkapkan bahwa kajian-kajian strategis oleh Lemhannas RI terhadap isu-isu regional, nasional, maupun internasional yang akan menghasilkan arsip-arsip penting bagi Bangsa dan Negara dapat diserahkan kepada ANRI agar bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Dalam penyelenggaraan kerja sama kearsipan, ANRI memberikan dukungan yang penuh berkaitan dengan pengarsipan Lemhannas RI.

Nota kesepahaman yang ditandatangani ini merupakan perpanjangan dari nota kesepahaman sebelumnya sebagai wujud komitmen bersama untuk menjalin kerja sama. Secara umum, nota kesepahaman ini meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, pengkajian strategis serta penerapan nilai-nilai kebangsaan, tukar menukar informasi dan bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang telah disepakati pada pihak sesuai perundangan yang berlaku.

Secara khusus, nota kesepahaman dengan ANRI menyepakati adanya pembinaan penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Lemhannas RI oleh ANRI serta pemanfaatan arsip statis melalui pameran dan penerbitan bersama oleh kedua belah pihak, sedangkan nota kesepahaman dengan LPP RRI menyepakati adanya publikasi dan sosialisasi pusat serta daerah terkait dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI.





Tim Redaksi newsletter Lemhannas RI

Pengarah: **Mochamad Iriawan** Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi: **Sugeng Santoso**

Redaktur Pelaksana: **Adri Koesdyanto** Penyunting/Editor: **Bambang Iman Aryanto**

Staf Redaksi: **Endah Heliana, Ni Made Vira Saraswati, C. Hildamona Permatasari, Magista Dian Fitrilia**

Desain: **Dwi Jayanto** Fotografer: **Suryadi, Suyono** Sekretariat: **Suparmo, Gatot, Ayu Novitasari**

Alamat Redaksi: **Biro Humas Settama Lemhannas RI**, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110

Telp. **(021) 3832108, 3832109** Fax. **(021) 3451926**

Website <http://www.lemhannas.go.id>